

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2024

UNAUDITED



BALAI KIPM BANJARMASIN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai KIPM Banjarmasin adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai KIPM Banjarmasin. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Banjarmasin, 2025

Kepala,

Hafit Rahman, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan Penting Lainnya
- VI. Lampiran dan Daftar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNTUNG MANGGIS, BANJARBARU 70724

TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546

LAMAN : www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin SURAT ELEKTRONIK bkikls2bjm@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Banjarmasin, Januari 2024

Kepala,

Hafit Rahman, S.Pi, M.Si

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin Semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 29,555,000 atau mencapai 53 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.52,960,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.5,766,260,929 atau mencapai 99.23 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.5,811,122,000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 16,835,723,220 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 25,069,045; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 16,802,035,696; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 8,618,479.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 261,727,350 dan Rp20,614,815,914.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 29,555,000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp (6,130,938,682) sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 6,101,383,682. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 6,118,431,950 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 6,118,431,950.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Januari 2024 adalah sebesar Rp.20,767,599,191 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 6,118,431,950 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2,148,268,928 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 16,797,436,169.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BALAI KIPM BANJARMASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Cat	TA 2024				TA 2023
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
B.1					
B.1	52.960.000	29.555.000	23.405.000	55,81	70.369.999
	52.960.000	29.555.000	23.405.000	55,81	70.369.999
B.2.					
B.3	3.039.233.000	3.038.969.188	263.812	99,99	5.120.765.275
B.4	2.771.889.000	2.727.291.741	44.597.259	98,39	3.430.467.801
B.5	-	-	-	0,00	326.216.900
B.6	-	-	-	-	-
	5.811.122.000	5.766.260.929	44.861.071	99,23	8.877.449.976

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI KIPM BANJARMASIN
NERACA
PER 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.4	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	25.069.045	113.888.110
JUMLAH ASET LANCAR		25.069.045	113.888.110
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	12.431.711.000	14.422.138.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4.255.383.615	9.301.909.631
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4.634.886.200	6.436.355.487
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	276.361.500	319.220.500
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-	15.650.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(4.796.306.619)	(9.812.761.871)
JUMLAH ASET TETAP		16.802.035.696	20.682.511.747
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG			
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.4	-	-
Aset Lain-Lain	C.4.1	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	8.618.479	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		8.618.479	-
JUMLAH ASET		16.835.723.220	20.796.399.857
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.5	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	38.287.051	28.800.666
Utang yang Belum ditagihkan	C.5.2	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.3	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		38.287.051	28.800.666
JUMLAH KEWAJIBAN		38.287.051	28.800.666
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	16.797.436.169	20.767.599.191
JUMLAH EKUITAS		16.797.436.169	20.767.599.191

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KIPM BANJARMASIN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	29.555.000	67.260.000
JUMLAH PENDAPATAN		29.555.000	67.260.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.051.604.616	2.656.807.300
Beban Persediaan	D.3	162.786.400	72.270.100
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.471.206.312	857.073.900
Beban Pemeliharaan	D.5	731.717.313	707.823.500
Beban Perjalanan Dinas	D.6	440.005.794	306.154.600
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	273618247	323.846.900
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		6.130.938.682	4.923.976.600
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.101.383.682)	(4.856.716.600)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(17.028.303)	
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		-	
Beban Penjualan Aset Non Lancar		-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(19.965)	(6.048.400)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(19.965)	6.048.400
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	(17.048.268)	(6.048.400)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(6.118.431.950)	(4.862.765.000)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	
Beban Luar Biasa		-	
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI KIPM BANJARMASIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	20.767.599.191	21.368.860.740
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.118.431.950)	(9.410.004.776)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.148.268.928	8.808.743.227
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3.970.163.022)	(601.261.549)
EKUITAS AKHIR	E.6	16.797.436.169	20.767.599.191

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai KIPM Banjarmasin

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 92 /PERMEN - KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai KIPM Banjarmasin mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Tugas : melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
- b. Fungsi :
 - penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,
 - pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya

Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan surveilan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di

Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;

- penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

c. Struktur Organisasi

Sesuai Permen KP No. 92 Tahun 2020 tentang Susunan organisasi Balai KIPM Banjarmasin, terdiri atas:

1. Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Satker Pelabuhan Trisakti, wilker Batulicin dan Wilket Kotabaru

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya.”

MISI :

- 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.*
- 2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.*
- 3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.*

TUJUAN :

“Melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional”.

SASARAN STRATEGIS :

- 1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;*
- 2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;*
- 3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;*

4. *Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;*
5. *Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.*

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai KIPM Banjarmasin. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Balai KIPM Banjarmasin menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai KIPM Banjarmasin dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai KIPM Banjarmasin. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang

dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Balai KIPM Banjarmasin memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar 6,173,055,000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	52,960,000	52,960,000
Jumlah Pendapatan	52,960,000	52,960,000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.377.308.000	3,039,233,000
Belanja Barang	3.432.154.000	2.771.889.000
Belanja Modal	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	9,809,462,000	5,811,122,000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp. 29,555,000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 29,555,000 atau mencapai 56.09 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.52,960,000. Pendapatan Satuan Kerja Balai KIPM Banjarmasin terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya dan Pendapatan Jasa Karantina Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	52,960,000	29,555,000	56.09

Pendapatan Jasa Karantina Perikanan			
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	52,960,000	29,555,000	56.09

Realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya TA 2024 mengalami Penurunan 8.77 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Adanya Pemisahan antara BKIPM dan BKIHT.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	29,515,000	63,300,000	46.62
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	40,000	3,960,000	1,09
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	29,555,000	67,260,000	43.94

Realisasi Belanja
Rp 5,766,261,311

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai KIPM Banjarmasin pada TA 2024 adalah sebesar Rp 5,766,261,311 atau 99.23% dari anggaran belanja sebesar Rp 5,811,122,000, Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,039,233,000	3,038,969,570	99.99
Belanja Barang	2.771.889.000	2,727,291,741	90.89
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	5,766,260,929	8,877,449,976	99.23
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	5,766,260,929	8,877,449,976	99.23

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami Penurunan dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya Jumlah pegawai yang mengakibatkan Jumlah Anggaran Berkurang dan berkurangnya jumlah pegawai yg naik pangkat.
2. Terdapat beberapaka kegiatan masih dalam pagu saldo blokir AA, sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan.

**Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Belanja Pegawai	3,038,969,188	5,120,765,275
Belanja Barang	2,727,291,741	3,430,467,801
Belanja Modal	-	326,216,900
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah	5,766,260,929	8,877,449,976

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp.3,038,969,188*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3,038,969,188 dan Rp 5,120,765,275. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami Penurunan sebesar 16,94 persen dari TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,120,765,279	2,471,263,466	6,5
Belanja Lembur	4,261,000	82,665,000	0,13
Jumlah Belanja Kotor	3,038,969,570	5,120,765,27	6.94

Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	3,038,969,570	5,120,765,27	6.94

Belanja Barang
3,038,969,188

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 3,038,969,188 dan Rp.5,120,765,275. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami Penurunan 59.34% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Berkurangnya kegiatan di Balai KIPM Banjarmasin karena anggaran dan kegiatan di alihkan ke BKHIT,
2. Adanya saldo Blokir AA yang mengakibatkan Kegiatan belum dapat terealisasi,

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	1,114,634,064	1,171,339,851	(95.15)
Belanja Barang Non Operasional	13,389,000	15,081,000	(88.78)
Belanja Persediaan	74,635,000	9,727,800	(76.73)
Belanja Jasa	258,137,654	285,703,613	(90.35)
Belanja Pemeliharaan	693,266,513	715,731,448	(96.86)
Belanja Perjalanan Dinas	55,957,846	95,373,266	(58.67)
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	856,925,577	1,187,074,195	7.21
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	856,925,577	1,187,074,195	7.21

Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.161,496,900. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan TA 2023 Karena Pada TA 2024 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	161,496,900	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	161,496,900	(100)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	161,496,900	(100)

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp161,496,900. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung layanan perkantoran lebih kecil dari sebelumnya.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Komputer Unit			
A.C Split			
Meja dan Kursi			
Jumlah Belanja Kotor	0	161,496,900	(100)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	161,496,900	(100)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Renovasi Gedung Kantor	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-

Jumlah Belanja Modal	-	-	-
-----------------------------	---	---	---

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rpdan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

*Aset Lancar Rp.
25,069,045*

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 25,069,045 dan Rp 113,888,110.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp0*

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai		0
Bank BNI	0	0
Jumlah	0	0

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 2
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp0*

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNBP		
Piutang Lainnya		
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.			
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.			
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-

Beban Dibayar di Muka
R0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang

atau jasa belum diterima seluruhnya.
Rincian Beban Dibayar di Muka Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	0
Jumlah	-	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp. 25,069,045

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 25,069,045 dan Rp.113,888,110 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	9,483,295	24,811,051

Bahan untuk Pemeliharaan	804,000	6,982,100
Suku Cadang	730,900	22,270,000
Bahan Baku	14,050,850	327,871,373
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	25,069,045	113,888,110

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp 16,802,035,696

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 16,802,035,696 dan Rp20,682,511,747. Terjadi pengurangan aset tetap dikarenakan adanya peralihan status asset dari Balai KIPM Banjarmasin ke Badan Karantina Indonesia.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai KIPM Banjarmasin berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp 12,431,711,000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 12,431,711,000 dan Rp14,422,138,000, Terdapat Peralihan status asset berupa tanah untuk wilayah kerja Trisakti dan Kotabaru seluas 1.552m Rp. 1.990.427.000 Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

*Tabel 11
Rincian Mutasi Tanah*

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	14,422,138,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	
Peralihan Aset	1.990.427.000-
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	12,431,711,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	12,431,711,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Tanah TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1,869 m2	iA. yani, Km. 29,42n Yoes	11.749.282.000
4	510 m2	Jl. Angkasa No.16	682.429.000
Jumlah			12,431,711,000

Peralatan dan Mesin

Rp. 4,255,383,615

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,255,383,615 dan Rp9,904,378,183.

Mutasi tambah peralatan dan mesin dari Balai KIPM Makasar antara lain adalah sebagai berikut:

Pembelian komputer unit berupa PC senilai Rp-; dan

Pembelian peralatan komputer senilai Rp0.

Pembelian Alat Rumah Tangga senilai Rp0.

Pembelian Alat Pengolahan senilai Rp 0.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan

Rp 4,634,886,200

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,634,886,200 dan Rp. 6,436,355,487.

Terdapat peralihan status aset dari Balai KIPM Banjarmasin ke Badan Karantina indonesian, sedangkan Tidak Terdapat Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan pada Balai KIPM Banjarmasin

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Rp 276,361,500

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 276,361,500 dan Rp319.220.500 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan

Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya

Rp.0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-

masing sebesar Rp0 (diakrenakan adanya peralihan asset monogrami ke badan karantina Indonesia) dan Rp 15,650,000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	15.650.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 30 Juni 2023	15.650.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.4,796,306,619

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,796,306,619 dan Rp.9,812,761,871.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Balai KIPM Banjarmasin merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	-		
2.	-		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
6.	-		
	Jumlah		

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	-		
2.	-		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
	Jumlah		

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Jangka

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024

Panjang Rp0

dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel 20
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang TA 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-		
Kurang Lancar	-		
Diragukan	-		
Macet	-		
Jumlah	-		
Tagihan TPA			
Lancar	-		
Kurang Lancar	-		
Diragukan	-		
Macet	-		
Jumlah	-		
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-		

Aset Lainnya

Rp0

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai KIPM Banjarmasin terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai KIPM Banjarmasin berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel 21
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Saldo Per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	-	-
2.	-	-
	Jumlah	-

Aset Lain-Lain
Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai KIPM Banjarmasin. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	
Saldo Per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software			
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain			
	Jumlah			
	Total	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka Pendek Rp. 38,287,051

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 38,287,051 dan Rp28,800,666. Utang Pihak Ketiga Terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, 38,287,051 (Biaya Langganan daya dan jasa, Langganan Telepon, Langganan Listrik, Langganan PDAM, Kekurangna Tunjangan Kinerja Pegawai, SPM RPATA)

Utang Muka dari KPPN Rp-

C.5.1. Utang Muka dari KPPN

Utang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp- dan Rp0, merupakan Utang Persediaan (UP) atau Tambahan Utang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.38,287,051

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 38,287,051 dan Rp.28,800,666. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai KIPM Banjarmasin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Utang kepada Pihak Ketiga	38,287,051
Total		38,287,051

Utang Pihak Ketiga Terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, 38,287,051

- langganan daya dan Jasa Rp. 4.018.200
- Langganan Telepon Rp. 65.379
- Langganan PDAM Rp. 2.326.000
- Langganan Listrik Rp. 10.623.565
- kekurangan Tunjangan Kinerja 12.635.428
- SPM RPATA (Jasa Outsourcing) 8.618.479

C.5.3. Utang Yang Belum Diterima Tagihannya

Utang Yang belum diterima Tagihannya pada satker balai KIPM Banjarmasin Sebesar Rp. -

Utang Yang Belum Diterima Tagihannya Rp -

Tabel 26

Rincian Utang Yang belum diterima Tagihannya TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	-	-
2.	-	-
Total		-

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	
-	
-	
Jumlah	-

Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp16,797,436,169

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 16,797,436,169 dan Rp. 20,767,599,191. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP.Rp.
29,555,000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 29,555,000 dan Rp. 67,260,000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	29,555,000	67,260,000	56.09
Pendapatan Pendidikan	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
Jumlah	29,555,000	67,260,000	56.09

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya serta Pendapatan Jasa Karantina Perikanan.

Beban Pegawai
Rp. 3,051,604,616

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,051,604,616 dan Rp. 5,108,103,27. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp.162,786,400

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.162,786,400 dan Rp. 382,015,638. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	65,065,032	18,000,638	
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	97,721,368	127,015.000	
Jumlah Beban	162,786,400	382,015,638	

Beban Barang dan Jasa
Rp. 1,471,206,312

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,471,206,312 dan Rp. 1,758,581,041. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	849,661,254	1.433,940,371	0,84
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	85,531,900	98,404,400	0,08
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	13,008,000	2,777,000	8,14
Beban Honor Operasional Satker	80,256,000	49,224,000	0,68
Beban Barang Operasional Lainnya	83,932,480	79,188,190	0,48
Beban Bahan	56,870,000	73,868,076	0,07
Beban Honor Output Kegiatan	4,896,000	3,400,000	0,60
Beban Barang Non Operasional Lainnya	28,236,116	24,136,130	0,88
Beban Langganan Listrik	154,786,540	91,352,886	0,73
Beban Langganan Telepon	5,040,304	5.515,189	1,00
Beban Langganan Air	18,451,887	6,202,195	1,32
Beban Sewa	25,000,000	25,000,000	100
Beban Jasa Lainnya	65,535,831	39,065,500	0,63
Jumlah Beban	615.316.650	1,758,581,041	0,71

*Beban
Pemeliharaan
Rp.731,717,313*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 731,717,313 dan Rp. 1,021,846,567. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan

bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	279,348,300	199.211.700	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	413,918,213	276.850.519	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	34,764,900	37,185,900	
Beban Persediaan suku cadang	3,685,900	234,970,419	
Jumlah Beban	731,717,313	1,021,846,567	

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.440,005,79
4

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 440,005,794 dan Rp. 597,435,235. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	423,355,794	221.750.000	7,05
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,650,000	94.176.833	0,65
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57.555.029	190.227.790	0,47
Jumlah Beban	440,005,794	597,435,235	73.64

Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Masyarakat Rp0

Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp273,618,247

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 273,618,248 dan Rp. 601,684,259. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas

nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	-	-	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Kegiatan Non
Operasional
Rp0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Penjualan Alat Kantor	-	-	
Selisih Kurs	-	-	
Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp20,767,599,191
1

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp20,767,599,191 dan Rp21,368,860,740.

Defisit LO
Rp
(6,118,431,950)

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp (6,118,431,950) dan (9,410,004,776) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0
Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	-
2.	Suku Cadang	-
Jumlah		-

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2024

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp. 2,148,268,928

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar

Rp2,747,897,562 dan Rp.8,808,743,227.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 31

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(29,555,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,766,260,929
Transfer Masuk	80.900.500
Transfer Keluar	(3.669.337.501)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	2,148,268,928

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(29,555,000) sedangkan DKEL sebesar Rp. 5,766,260,929.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.80.900.500 merupakan Sertifikat dari Sekretariat BPPMKHP dan Aset berupa PC dan Laptop dari UPT BPPMHKP Makasar terdiri dari:

Tabel 32

Transfer Masuk TA 2024

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Balai KIPM Makasar	79.508.000
2.	Health Certificate	Sekretariat Badan	1,392,500
Jumlah			80.900.500

Tidak Terdapat Transfer Keluar sebesar Rp. 3.669.337.501 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. merupakan Peralihan status Aset ke BKI yang terdiri dari

Tabel 33
Transfer Keular TA 2024

No.	Jenis	Mutasi Keluar	Nilai
1.	Tanah, Gedung, Peralatan dan Mesin	Balai KIPM Makasar	7,333,923,228
2.	Akumulasi Penyusutan		3.664.585.727
Jumlah			3.669.337.501

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Pengesahan Hibah Langsung TA 2024

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	-	-
2.	-	-	-
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir Rp.
16,797,436,169

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 16,797,436,169 dan Rp. 20,767,599,191

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat Kejadian-kejadian Penting setelah tanggal Neraca.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

F.2a. Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional Tahun 2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan lingkup BPPMHKP dengan pagu yang telah direvisi senilai Rp.308.000.000 dan realisasi senilai Rp.276.730.341

atau 89,84% dari pagu, dengan rincian disajikan pada Tabel Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Satker Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2024. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan (terrealisasi) dikarenakan msh dalam tahap saldo blokir

- 3990.PDF - Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi
- 7010.PBR - Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan

Tabel 35

Program Prioritas Nasional TA 2024

Rincian Output	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
3989.PDC - Sertifikasi Produk	45,000,000	41,830,405	92.96
3989.PDF Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	80.000.000	61,830,132.	77.29
3989.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	60.000.000	59,967,925.	99.95
3989.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	12.000.000	11,252,893	93.77
7010.PBR - Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	75.000.000	66,948,365.00	89.26
7010.PDD.001 - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance ses	8.500.000	8,492,325.00	99.91
7010.PDD.001 - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan	19.000.000	18,999,996.00	100

quality assurance ses			
7010.QIA Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	8.500.000	7,408,300.00	87.16
Total	308.000.000	276.730.341	89.84%

F.2b. Capaian output Strategis

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Balai KIPM Banjarmasin 2024 sebagai Berikut :

Periode s.d bulan	: 2024-12											
Kementerian Negara/Lembaga	: 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN											
Eselon 1	: 032.13 - BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN											
Wilayah/Provinsi	: 15.51 - KOTA BANJARMASIN/KALIMANTAN SELATAN											
Satuan Kerja	: 649593 - BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN											
											Halaman	: 1
											Tanggal Cetak	: 1
Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan	
		Pagu	Realisasi	Persentase	Tar get	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian				
04	EKONOMI	5.811.122.000	5.750.989.233	98,97%								
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN	5.811.122.000	5.750.989.233	98,97%								
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	455.000.000	421.794.678	92,7%								
3989	Pengendalian Mutu	339.000.000	315.103.105	92,95%								
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	10.000.000	9.952.034	99,52%								
009	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan	10.000.000	9.952.034	99,52%	1,0000	Rekomendasi	1,0000	100%	0,48%	00	-	
ADF	Sertifikasi Lembaga	40.000.000	39.890.000	99,73%								
001	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang	40.000.000	39.890.000	99,73%	10,0000	Lembaga	10,0000	100%	0,27%	00	-	
BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	12.000.000	11.999.716	100%								
001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan	12.000.000	11.999.716	100%	1,0000	Produk	1,0000	100%	0%	00	240451701001603	
PDC	Sertifikasi Produk	45.000.000	41.830.405	92,96%								
001	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point	25.000.000	23.689.293	94,76%	15,0000	Produk	15,0000	100%	5,24%	(99) Lainnya	240451701001599	
002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi	20.000.000	18.141.112	90,71%	10,0000	Produk	10,0000	100%	9,29%	(01) Adanya	240451701001599	
PDF	Sertifikasi Lembaga	80.000.000	61.830.132	77,29%								
002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi	80.000.000	61.830.132	77,29%	21,0000	Lembaga	21,0000	100%	22,71%	(99) Lainnya	240451701001599	
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	60.000.000	59.967.925	99,95%								
001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	60.000.000	59.967.925	99,95%	3,0000	Produk	3,0000	100%	0,05%	00	240451701001599	
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	92.000.000	89.632.893	97,43%								
001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang	12.000.000	11.252.893	93,77%	3,0000	Lembaga	3,0000	100%	6,23%	(99) Lainnya	240451701001599	
002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan	80.000.000	78.380.000	97,98%	12,0000	Lembaga	12,0000	100%	2,02%	00	240451701001599	
7010	Manajemen Mutu	116.000.000	106.691.573	91,98%								
DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	5.000.000	4.842.587	96,85%								
001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan	5.000.000	4.842.587	96,85%	1,0000	Kegiatan	1,0000	100%	3,15%	00	240451701001599	

PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	75.000.000	66.948.365	89,26%							
001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang	75.000.000	66.948.365	89,26%	1,000	Rekomendasi	1,000	100%	10,74%	(99) Lainnya	240451701001599
PDD	Standarisasi Lembaga	27.500.000	27.492.321	99,97%							
001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian	8.500.000	8.492.325	99,91%	1,000	Lembaga	1,000	100%	0,09%	00	240451701001599
002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu	19.000.000	18.999.996	100%	1,000	Lembaga	1,000	100%	0%	00	240451701001599
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	8.500.000	7.408.300	87,16%							
001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality	8.500.000	7.408.300	87,16%	1,000	Produk	1,000	100%	12,84%	(99) Lainnya	240451701001599
WA	Program Dukungan Manajemen	5.356.122.000	5.329.194.555	99,5%							
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan	5.356.122.000	5.329.194.555	99,5%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.220.542.000	5.193.783.823	99,49%							
956	Layanan BMN	14.180.000	14.089.100	99,36%	2,000	Layanan	2,000	100%	0,64%	00	240451701001599
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	11.721.000	11.576.000	98,76%	1,000	Layanan	1,000	100%	1,24%	00	240451701001599
963	Layanan Data dan Informasi	1.252.000	1.252.000	100%	1,000	Layanan	1,000	100%	0%	00	240451701001599
994	Layanan Perkantoran	5.193.389.000	5.166.866.723	99,49%	1,000	Layanan	1,000	100%	0,51%	00	240451701001599
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	49.741.000	49.665.746	99,85%							
954	Layanan Manajemen SDM	49.741.000	49.665.746	99,85%	1,000	Orang	1,000	100%	0,15%	00	240451701001599
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	85.839.000	85.744.986	99,89%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	31.980.000	31.908.216	99,78%	4,000	Dokumen	4,000	100%	0,22%	00	240451701001599
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8.744.000	8.723.000	99,76%	1,000	Dokumen	1,000	100%	0,24%	00	240451701001599
955	Layanan Manajemen Keuangan	43.022.000	43.020.770	100%	1,000	Dokumen	1,000	100%	0%	00	240451701001599
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2.093.000	2.093.000	100%	1,000	Dokumen	1,000	100%	0%	00	240451701001599

F.2c. Tematik APBN

Untuk TA 2024, Tidak terdapat Tematik APBN di satker Balai KIPM Banjarmasin.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai KIPM Banjarmasin selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.001/06.0/KU.110/I/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pejabat Pengelola Keuangan Balai KIPM Banjarmasin sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Rachmiyati,S.E
 Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM: Untung Ifriansyah,
 S.Sos
 Bendahara Pengeluaran : Yusniati Aritonang,
 A.Md.,S.E

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN 649593

Tgl Data : 14/01/25 12:57 PM
Tgl Cetak : 14/01/25 10:23 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,811,122,000	5,766,260,929	(44,861,071)	99	8,927,985,000	8,877,449,976	50,535,024	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Banjarbaru, 14 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Balai

HAFIT RAHMAN, S.PI., MP
NIP 196812231989031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 14/01/25 12:57 PM

Tgl Cetak : 14/01/25 10:23 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	9,483,295	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	804,000	0
0.0	117114	Suku Cadang	730,900	0
0.0	117131	Bahan Baku	14,050,850	0
0.0	131111	Tanah	12,431,711,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,255,383,615	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,634,886,200	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	45,405,800	0
0.0	134113	Jaringan	230,955,700	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,984,555,836
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	715,191,141
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	31,784,060
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	64,775,582
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	8,618,479	0
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	12,635,428
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	17,033,144
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	8,618,479
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,766,260,929
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	29,555,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	3,669,337,501	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	80,900,500
0.0	391111	Ekuitas	0	20,767,599,191
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	29,515,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	40,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,034,394,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,410	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	62,307,020	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	23,775,388	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	33,300,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	76,990,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	18,973,967	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	50,983,680	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	128,430,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,200,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	90,641,100	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,093	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,040,250	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,895,574	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 14/01/25 12:57 PM

Tgl Cetak : 14/01/25 10:23 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,770,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,503,920	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	11,625,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	3,319,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	942,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,384,495,414	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	104,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	849,661,254	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	85,531,900	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,008,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	80,256,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	83,932,480	0
3.0	521211	Beban Bahan	56,870,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,896,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	28,236,116	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	154,786,540	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,040,304	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	18,451,887	0
3.0	522141	Beban Sewa	25,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	65,535,831	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	279,348,300	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	413,918,213	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	423,355,794	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,650,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	193,343,785	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	72,736,171	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4,651,345	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,886,946	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	65,065,032	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	34,764,900	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	3,685,900	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	97,721,368	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	17,028,303	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	19,965	0
JUMLAH			31,478,909,290	31,478,909,290

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Banjarbaru, 14 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Balai

HAFIT RAHMAN, S.PI., MP

NIP 196812231989031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 14/01/25 6:24 PM

Tgl Cetak : 14/01/25 10:22 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	20,767,599,191	21,368,860,740	(601,261,549)	(2.81)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,118,431,950)	(9,410,004,776)	3,291,572,826	(34.98)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,148,268,928	8,808,743,227	(6,660,474,299)	(75.61)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,970,163,022)	(601,261,549)	(3,368,901,473)	560.31
EKUITAS AKHIR	16,797,436,169	20,767,599,191	(3,970,163,022)	(19.12)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Banjarbaru, 14 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Balai

HAFIT RAHMAN, S.PI., MP

NIP 196812231989031001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 14/01/25 12:57 PM

Tgl Cetak : 14/01/25 10:22 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	29,555,000	67,260,000	(37,705,000)	(56.059)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	29,555,000	67,260,000	(37,705,000)	(56.059)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	(29,555,000)	(67,260,000)	37,705,000	(56.059)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,051,604,616	5,108,103,275	(2,056,498,659)	(40.26)
Beban Persediaan	162,786,400	382,015,638	(219,229,238)	(57.388)
Beban Barang dan Jasa	1,471,206,312	1,758,581,041	(287,374,729)	(16.341)
Beban Pemeliharaan	731,717,313	1,021,846,567	(290,129,254)	(28.393)
Beban Perjalanan Dinas	440,005,794	597,435,235	(157,429,441)	(26.351)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN
 SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 14/01/25 12:57 PM

Tgl Cetak : 14/01/25 10:22 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	273,618,247	601,684,259	(328,066,012)	(54.525)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	(6,130,938,682)	(9,469,666,015)	3,338,727,333	(35.257)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	6,101,383,682	9,402,406,015	(3,301,022,333)	(35.108)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(17,028,303)	(1,550,301)	(15,478,002)	998.387
Pendapatan Pelepasan Aset	0	(3,109,999)	3,109,999	(100)
Beban Pelepasan Aset	(17,028,303)	(4,660,300)	(12,368,003)	265.391
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(19,965)	(6,048,460)	6,028,495	(99.67)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(19,965)	(6,048,460)	6,028,495	(99.67)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(17,048,268)	(7,598,761)	(9,449,507)	124.356
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	6,118,431,950	9,410,004,776	(3,291,572,826)	(34.98)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	6,118,431,950	9,410,004,776	(3,291,572,826)	(34.98)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Banjarbaru, 14 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Balai

HAFIT RAHMAN, S.PI., MP

NIP 196812231989031001

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BKIPM
 WILAYAH : 1500 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649593 BALAI KIPM BANJARMASIN
 NO DOKUMEN : 00001
 TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2024 / SEMESTER II TA 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 <input type="checkbox"/> | Koreksi Antar Beban |
| 2 <input type="checkbox"/> | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 <input type="checkbox"/> | Beban Dibayar Dimuka | 13 <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | 15 <input type="checkbox"/> | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | 16 <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 <input type="checkbox"/> | Penyusutan | 17 <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| 8 <input type="checkbox"/> | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| 9 <input type="checkbox"/> | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| 10 <input type="checkbox"/> | Persediaan | 20 <input type="checkbox"/> | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	2	3	4	5	6
1	D	522112	Beban Langganan Telpon	65.379,00	
2	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		65.379,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban langganan telpon yang masih harus diayar

Dibuat oleh:
Yusniati Aritonang



31-Dec-24

Disetujui oleh :
Hani Rahman



31-Dec-24

Direkam oleh :
Yusniati Aritonang



31-Dec-24

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BKIPM
 WILAYAH : 1500 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649593 BALAI KIPM BANJARMASIN
 NO DOKUMEN : 00002
 TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2024 / SEMESTER II TA 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 <input type="checkbox"/> | Koreksi Antar Beban |
| 2 <input type="checkbox"/> | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 <input type="checkbox"/> | Beban Dibayar Dimuka | 13 <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | 15 <input type="checkbox"/> | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | 16 <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 <input type="checkbox"/> | Penyusutan | 17 <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| 8 <input type="checkbox"/> | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| 9 <input type="checkbox"/> | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| 10 <input type="checkbox"/> | Persediaan | 20 <input type="checkbox"/> | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	2	3	4	5	6
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	10.623.565,00	
2	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		10.623.565,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban Langganan Listrik yang masih harus dibayar

Dibuat oleh:
Yusniati Aritonang



31-Dec-24

Disetujui oleh :
Haji Rahman



31-Dec-24

Direkam oleh :
Yusniati Aritonang



31-Dec-24

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BKIPM
 WILAYAH : 1500 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649593 BALAI KIPM BANJARMASIN
 NO DOKUMEN : 0003
 TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2024 / SEMESTER II TA 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 | <input type="checkbox"/> | Koreksi Antar Beban |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Beban Dibayar Dimuka | 13 | <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 | <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | 15 | <input type="checkbox"/> | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | 16 | <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 | <input type="checkbox"/> | Penyusutan | 17 | <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| 8 | <input type="checkbox"/> | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 | <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| 9 | <input type="checkbox"/> | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 | <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| 10 | <input type="checkbox"/> | Persediaan | 20 | <input type="checkbox"/> | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	2	3	4	5	6
1	D	521111	Beban Langganan Daya Dan Jasa Lainnya	4.018.200,00	
2	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		4.018.200,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban Langganan Daya Dan Jasa Lainnya yang masih harus dibayar

Dibuat oleh:
Yusniati Aritonang



31-Dec-24

Disetujui oleh :

Hamid Rahman



Direkam oleh :
Yusniati Aritonang



31-Dec-24

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BKIPM
 WILAYAH : 1500 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649593 BALAI KIPM BANJARMASIN
 NO DOKUMEN : 0004
 TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2024 / SEMESTER II TA 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 | <input type="checkbox"/> | Koreksi Antar Beban |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 | <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Beban Dibayar Dimuka | 13 | <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 | <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | 15 | <input type="checkbox"/> | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | 16 | <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 | <input type="checkbox"/> | Penyusutan | 17 | <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| 8 | <input type="checkbox"/> | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 | <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| 9 | <input type="checkbox"/> | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 | <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| 10 | <input type="checkbox"/> | Persediaan | 20 | <input type="checkbox"/> | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	2	3	4	5	6
1	D	522113	Beban Langganan Air	2.326.000,00	
2	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		2.326.000,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban langganan PDAM/ Air yang masih harus dibayar

Dibuat oleh:
Yusniati Aritonang

Disetujui oleh :
Hani Rahman

Direkam oleh :
Yusniati Aritonang

Yusniati Aritonang



Yusniati Aritonang

31-Dec-24

31-Dec-24

31-Dec-24

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BKIPM
 WILAYAH : 1500 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649593 BALAI KIPM BANJARMASIN
 NO DOKUMEN : 0004
 TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2024 / SEMESTER II TA 2024
 TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 <input type="checkbox"/> | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 <input type="checkbox"/> | Koreksi Antar Beban |
| 2 <input type="checkbox"/> | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 <input type="checkbox"/> | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 <input type="checkbox"/> | Beban Dibayar Dimuka | 13 <input type="checkbox"/> | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 <input type="checkbox"/> | Penyisihan Piutang | 15 <input type="checkbox"/> | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 <input type="checkbox"/> | Penghapusan Piutang | 16 <input type="checkbox"/> | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 <input type="checkbox"/> | Penyusutan | 17 <input type="checkbox"/> | Transfer Masuk |
| 8 <input type="checkbox"/> | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 <input type="checkbox"/> | Transfer Keluar |
| 9 <input type="checkbox"/> | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 <input type="checkbox"/> | Reklasifikasi Neraca |
| 10 <input type="checkbox"/> | Persediaan | 20 <input type="checkbox"/> | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	2	3	4	5	6
1	D	512441	Beban Pegawai/Tunjangan Khusus/Kegiatan)	12.635.428,00	-
2	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	12.635.428,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban langganan PDAM/ Air yang masih harus dibayar

Dibuat oleh:
Yusniati Aritonang



31-Dec-24

Disetujui oleh :

Hani Rahman



31-Dec-24

Direkam oleh :

Yusniati Aritonang



31-Dec-24

CATATAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TA 2024

UAPPA-E1	: 03213	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UAPPA-W	: 1500	Kalimantan Selatan
UAKPA	: 649593	Balai KIPM Banjarmasin
Periode Monev	: 31 DESEMBER 2024	
Pelaksanaan	: 14 Januari 2024	

No.	Uraian	Catatan dan Keterangan
-----	--------	------------------------

To Do List

1	Persediaan Belum Diditilkan	Tidak Ada
2	TK Persediaan Belum TM	Tidak Ada
3	RK Persediaan Belum RM	Tidak Ada
4	RK Aset ke Persediaan Belum RM	Tidak Ada
5	TK Internal Belum TM Internal Persediaan	Tidak Ada
6	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan	Tidak Ada
7	Aset Belum Diditilkan	Tidak Ada
8	TK Aset Belum TM	Tidak Ada
9	RK Aset Belum RM	Tidak Ada
10	RK Persediaan ke Aset Belum RM	Tidak Ada
11	TK Internal Belum TM Internal Aset	Tidak Ada
12	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Aset Tetap/ATB	Tidak Ada
13	Pendapatan Belum di Settle Piutang	Tidak Ada
14	TK Piutang Belum TM	Tidak Ada
15	Belum Penyisihan Piutang	Tidak Ada
16	Aset Belum Validasi Approve	Tidak Ada
17	Persediaan Belum Approve	Tidak Ada
18	Saldo Akun Utang yang Belum Ditagihkan	Tidak Ada
19	Saldo Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Tidak Ada
20	Pagu Minus Selain Akun 51XXXX (Basis SP2D)	Tidak Ada
21	Pajak Non DJP dan DJBC	Tidak Ada
22	Pengembalian Melebihi Realisasi Selain Akun 51XXXX	Tidak Ada
23	Transaksi Resiprokal	Tidak Ada
24	Saldo Akun Tidak Normal	Tidak Ada
25	Pagu Minus Akun 51XXXX (Basis SP2D)	Tidak Ada
26	Pengembalian Melebihi Realisasi Akun	Tidak Ada

Monitoring

1	Monitoring Tutup Periode	Tutup periode menunggu dari Eselon I
2	Monitoring Transfer Keluar/Masuk	Tidak Ada
3	Monitoring Reklas Keluar/Masuk	Tidak Ada
4	Monitoring Saldo Piutang Per KL/ Es1/Satker	Tidak Ada
5	Monitoring Pelimpahan Piutang ke PUPN	Tidak Ada
6	Monitoring Saldo KDP	Tidak Ada
7	Monitoring Piutang Macet	Tidak Ada
8	Monitoring Belanja Modal vs Aset	Tidak Ada
9	Monitoring Belanja Persediaan vs Pembelian	Tidak Ada
10	Monitoring MPHJBJS	Tidak Ada
11	Piutang Jatuh Tempo	Tidak Ada
12	Monitoring Likuidasi Keluar - Likuidasi Masuk	Tidak Ada
13	Monitoring Tindak Lanjut Indikasi BMN yg sdh dihapuskan di SIMAKBMN	Tidak Ada
14	Monitoring Pendapatan Perolehan Aset	Tidak Ada
15	Monitoring Transaksi Resiprokal	Tidak Ada
16	Monitoring Detail Revisi SPM	Tidak Ada

Rekonsiliasi

1	Rekonsiliasi Internal	
a.	Piutang	Tidak Ada

	b. Persediaan	Tidak Ada
	c. Aset	Tidak Ada
2	d. Rekonsiliasi SAKTI-SPAN	
	e. TDK Rupiah	Tidak Ada
	f. TDK COA	Tidak Ada

Rincian Modul Pelaporan		
1	Aset Belum Register	
2	Neraca Tidak Balance	

No.	Laporan Keuangan	Nominal (Rp)	Catatan dan Keterangan
Laporan Realisasi Anggaran		31 Desember 2024	
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	29.555.000	
2	Penerimaan Hibah	-	
3	Belanja Pegawai	3.038.969.188	
4	Belanja Barang	2.727.291.741	
5	Belanja Modal	-	
Neraca		31 Desember 2024	
1	Aset Lancar	25.069.045	
2	Investasi Jangka Panjang	-	
3	Aset Tetap	16.722.527.696	
4	Piutang Jangka Panjang	-	
5	Aset Lainnya	-	
6	Kewajiban Jangka Pendek	8.618.479	
7	Kewajiban Jangka Panjang	-	
8	Ekuitas	16.747.596.741	
Laporan Operasional		31 Desember 2024	
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	29.555.000	
2	Pendapatan Hibah	-	
3	Beban Operasional	6.071.715.110	
4	Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	
5	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.088.763.378	

Catatan Lain		

Rekomendasi		

Bandung, 14 JANUARI 2025

Yang Melaksanakan Monitoring,

Tim Pelaporan dan BMN				Operator GL dan Aset Satker	
				 (Yusniati Aritonang)	 (Akhmad Hidayat)
Linda K	Wawan S	Akhmad Nur Aziz	Hermawan Risky		

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2024**

Kode dan Nama UAKPA : (649593) Balai KIPM Banjarmasin Kode dan Nama UAPPAW : (1500) KALIMANTAN Selatan
 Kode dan Nama Eselon 1 : (13) BPPMHKP
 Kode dan Nama K/L : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1,	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak

	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1,	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak

Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		V	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		V	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		V	Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal				
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		0
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		V	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual		V	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk		V	Ya/Tidak
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		V	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		V	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		V	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		V	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan		V	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		V	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang		V	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		V	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		V	Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal		V	Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar		V	Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		V	Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	Ya	Tidak	Seharusnya
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
LAK BLU				
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

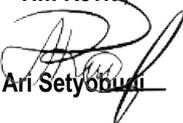
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang **TIDAK SEHARUSNYA**, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,
(Hafit Rahman S.Pl., MP)
NIP.198212311983031001



Balikpapan, 14 Januari 2025
Penelaah,
(Yusniati Aritonang, A.Md, S.E)
NIP.19860617 201012 2 001

Kementerian Kelautan dan Perikanan Inspektorat Jenderal		Disusun oleh/Tanggal	Ari / 15 Januari 2025
		Direviu oleh/Tanggal	Agus / 15 Januari 2025
		Disetujui oleh/Tanggal	Irman / 15 Januari 2025
UAPA	<input type="checkbox"/>	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
UAPPA-E1	<input type="checkbox"/>	BPPMKHP	
UAPPA-W	<input type="checkbox"/>	Provinsi Kalimantan Selatan	
UAKPA	<input type="checkbox"/>	Balai PPMHKP Banjarmasin	
Uraian Catatan Hasil Reviu			Indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi :			
<ol style="list-style-type: none"> Satker belum melakukan tutup buku per bulan Desember 2024 dan belum terbit SHR; Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00 sesuai dengan BA Kas Opname dan LPJ Bendahara Penerimaan; Persediaan senilai Rp25.069.045 telah didukung dengan BA Stock Opname dan sesuai dengan Permen KP 37 2023; Telaah LK oleh Biro Keuangan belum dilakukan; Validitas data laporan keuangan pada MonSAKTI per tanggal 14 Januari 2025 diketahui bahwa tidak terdapat permasalahan pada Menu To Do List. Aset Lain-Lain (rusak berat) senilai Rp1.643.627.075,00 telah dilakukan usulan penghapusan yaitu melalui usulan B.5204/BPPMHKP.1/PL.740/XII/2024 <p>Terdapat koreksi berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak terdapat koreksi. 			
Penyajian LK :			
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :			
Pagu sebesar Rp5.811.122.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.766.260.929,00 (99,22%) Target Pendapatan sebesar Rp52.960.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp29.555.000,00 (55,80%) Tidak ada koreksi			
B. Laporan Operasional :			
Surplus/Defisit LO senilai Rp(6.118.431.950,00) Tidak ada koreksi			
C. Laporan Perubahan Ekuitas :			
Ekuitas awal senilai Rp20.767.599.191,00 Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp(6.118.431.950,00) Ekuitas akhir senilai Rp16.797.436.169,00 Tidak ada koreksi,			
D. Neraca :			
<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Aset senilai Rp16.802.035.696,00, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Aset Lancar senilai Rp25.069.045,00 Aset Tetap senilai Rp15.650.000 Aset Lainnya (Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga) senilai Rp8.618.479,00 Jumlah Kewajiban senilai Rp38.287.051,00, berupa: <ol style="list-style-type: none"> Belanja Pegawai yang masih harus dibayar (Tunjangan Kinerja) senilai Rp12.635.428,00 Belanja Barang yang masih harus dibayar (Biaya langgaran listrik, air, dan telepon) senilai Rp17.033.144,00 			

3. Ekuitas senilai Rp16.797.436.169,00 .		
4. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas senilai Rp16.835.723.220,00		
Tidak ada koreksi		
E. Catatan atas Keuangan (CaLK) dan CLBMN		
1. CaLK dan CLBMN telah disusun		
Usulan Koreksi		
-		
Tindak Lanjut		
-		
Koreksi yang Belum Ditindak Lanjuti		
-		
		Bandung, 15 Januari 2025
Tim Reviu,  Ari Setyobudi	Operator Keuangan,  Yusniati Aritonang	Operator BMN  Akhmad Hidayat